



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA PERKUAT BIOSEKURITI

Firyal Nabihah

Analisis Legislatif Ahli Pertama

firyal.nabihah@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Isu biosekuriti menjadi perhatian utama Indonesia di tengah meningkatnya lalu lintas perdagangan dan mobilitas barang lintas negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terdapat lebih dari 46 juta ton komoditas pertanian yang diekspor dan diimpor melalui jalur laut dan udara. Namun, seiring tingginya aktivitas perdagangan tersebut, risiko masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dan penyakit hewan menular (PHM) juga meningkat. Laporan tahunan Barantin mencatat bahwa pada 2023 terdapat lebih dari 4.800 kasus temuan pelanggaran karantina, termasuk penyelundupan bibit ilegal dan produk hewan yang tidak memenuhi standar sanitasi. Di sisi lain, Australia sebagai mitra dagang utama Indonesia dalam sektor pangan juga menghadapi tantangan serupa, terutama dalam pengelolaan *ballast water*, penyebaran *biofouling*, dan epidemi penyakit hewan. Kondisi ini menuntut adanya sistem biosekuriti yang adaptif, kolaboratif, dan terstandar internasional.

Kerja sama antara Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) Australia telah berlangsung dalam berbagai bentuk, namun diperkuat kembali melalui lokakarya bilateral pada 1–2 Juli 2025 di Jakarta. Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum pertukaran pengetahuan, tetapi juga ruang penyusunan rencana kerja bersama untuk beberapa tahun ke depan. Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis dibahas seperti penguatan langkah-langkah sanitari dan fitosanitari (SPS) di sepanjang rantai biosekuriti, peningkatan kapabilitas uji diagnostik dan epidemiologi, pengelolaan air *ballast* dan *biofouling*, operasi pengawasan perbatasan, serta peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum karantina. Kolaborasi ini juga menjadi pijakan menuju harmonisasi kebijakan karantina dan pengakuan sistem satu sama lain untuk mempermudah akses pasar, meningkatkan kepercayaan global, serta menjaga ketahanan pangan dan lingkungan hidup.

Pentingnya kerja sama ini tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga politik. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyebut bahwa Badan Karantina merupakan “bumper negara” yang berperan penting dalam mencegah masuknya penyakit dan hama dari luar negeri melalui lebih dari 7.000 pelabuhan dan pintu masuk di wilayah kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai diperlukan agar Barantin dapat bekerja secara optimal, terutama dalam menghadapi praktik penyelundupan dan lemahnya pengawasan di beberapa titik rawan. Di tengah tantangan tersebut, Australia sebagai mitra yang sudah memiliki sistem biosekuriti yang maju dinilai dapat membantu Indonesia memperkuat kelembagaan, sistem, dan sumber daya manusia di sektor ini.

Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, terdapat lima strategi utama yang dirumuskan untuk memperkuat kerja sama Indonesia–Australia di bidang biosekuriti. *Pertama*, penyusunan nota kesepahaman (MoU) khusus di bidang sanitari dan fitosanitari yang mencakup karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, guna memberikan kepastian hukum dan arah kerja sama jangka panjang. *Kedua*, penguatan integrasi sistem informasi dan pertukaran data digital dalam layanan karantina, termasuk pelacakan komoditas secara *real-time* dan respons cepat terhadap

ancaman hayati. *Ketiga*, peningkatan kapabilitas uji laboratorium dan epidemiologi melalui pelatihan bersama, pertukaran ahli, serta investasi dalam infrastruktur laboratorium. *Keempat*, kolaborasi dalam pengawasan perbatasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran karantina untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan. *Kelima*, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi internasional, pelatihan teknis, dan program profesionalisme agar tenaga karantina Indonesia setara dengan mitra global.

Dengan implementasi kelima strategi tersebut, diharapkan sistem biosekuriti Indonesia akan makin tangguh dalam menghadapi ancaman lintas batas, sekaligus lebih siap menjawab tuntutan perdagangan bebas yang kompetitif dan aman. Kolaborasi ini juga menjadi bukti bahwa isu ketahanan pangan dan perlindungan hayati tidak dapat diselesaikan secara unilateral, melainkan membutuhkan kemitraan yang strategis dan saling menguntungkan. Sebagai negara agraris dan maritim, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam memastikan produk ekspor dan impornya bebas dari hama dan penyakit. Maka dari itu, kerja sama dengan Australia bukan hanya soal akses pasar, tetapi juga investasi jangka panjang dalam sistem perlindungan biosekuriti kawasan Asia-Pasifik.

Atensi DPR

Kerja sama biosekuriti antara Indonesia dan Australia menjadi langkah penting dalam menghadapi ancaman hama dan penyakit lintas batas serta memperkuat sistem perdagangan yang aman dan berkelanjutan. DPR RI, melalui Komisi IV, memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan kerja sama ini. Melalui fungsi legislasi, Komisi IV DPR RI dapat mendorong pembaruan undang-undang dan regulasi karantina yang lebih adaptif terhadap dinamika global dan selaras dengan standar internasional. Dalam fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI diharapkan mengawal alokasi dana yang cukup untuk peningkatan kapasitas laboratorium uji diagnostik, modernisasi sistem pengawasan digital, pengelolaan air *ballast* dan *biofouling*, serta peningkatan kompetensi SDM perkarantina. Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu memastikan bahwa program kerja sama yang dijalankan oleh Barantin benar-benar berjalan efektif di lapangan, berpihak pada perlindungan sumber daya hayati nasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok perdagangan global.

Sumber

antaranews.com, 2 Juli 2025;
bps.go.id, 5 Juli 2024;
bisnis.com, 3 Juli 2025;
mediaindonesia.com, 3 Juli 2025;
pikiranrakyat.com, 4 Juli 2025; dan
portonews.com, 3 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making